



**Dasawarsa Courant
Pre-Launching Buku Goesti Soeloeng Lelanang
3 Siswa SMKN 4 Pontianak
Berhasil Luncurkan Raket Nusantara**

**Kabupaten Sanggau Akan Menerapkan
Program Sekolah Lima Hari**

ISSN 3089-2015

Volume 1 Nomor 05, Maret 2025



PIMPINAN REDAKSI

TOMI, S.Pd.,M.E.

REDAKTUR & EDITOR

WERDA NINGSIH, S.Pd

LAY OUT

NAJWA AT. THOMIMY

MEDIA

DAYANG SURTILAH

ADMIN

MOHAMMAD SULTHAN

KEPALA KONTRIBUTOR

FATIHAH AT. THOMIMY

KONTRIBUTOR

UMI WAWA

ABI AHMAD

JIHAN ANNISA

<https://majalahdekade.tomsbook.co.id>

Diterbitkan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat,
Maret 2025

Oleh:

CV. Tom'S Book Publishing

Jl. Padat Karya No. 12 Kelurahan Bunut
Kecamatan Kapuas – Kabupaten Sanggau
Kalimantan Barat – Indonesia

Contact Person +62 85752078799

Email: tomsbooks.publishing@gmail.com

Website : <http://tomsbook.co.id>

CV. Tom'S Book Publishing © Maret 2025

1. Dasawarsa Courant Pre-Launching Buku Goesti Soeloeng Lelanang 3 – 5
2. Sejumlah Kepala Sekolah di Sungai Kakap Ingin Mengundurkan Diri Terkait Pelaporan Dana BOS 6 – 8
3. 1 Ramadan 1446 H ditetapkan Pemerintah Jatuh pada 1 Maret 2025 9 – 10
4. Sindiran Putra Mahkota Solo di Medsos 'Nyesel Gabung Republik' jadi Sorotan 11 – 13
5. Sejarah Kasunanan Surakarta Bergabung ke Republik Indonesia . 14 – 18
6. Putra Mahkota Keraton Surakarta Enggan Minta Maaf Terkait Unggahan 'Nyesel gabung Republik' 19 – 20
7. Lagi... dan lagi... Profesi Guru diKriminalisasi, Guru Al-Azhar Pontianak Dijadikan Tersangka karena Disiplinkan Siswa, Dugaan diKriminalisasi oleh Oknum Orang Tua yang Berdinas di Propam Polda Kalbar 21 – 27
8. Respon Ketua PGRI Provinsi Kalbar Terhadap Penetapan Status Tersangka Guru SD Islam Al Azhar 21 Pontianak, Muhammad Saelan 28 – 30
9. Perkara Guru SD Islam Al Azhar 21 Pontianak Berakhir Damai, Kedua Pihak Akhirnya Saling Memaafkan 31 – 34
10. Kabupaten Sanggau Akan Menerapkan Program Sekolah Lima Hari 35 – 36
11. 3 Siswa SMKN 4 Pontianak Berhasil Luncurkan Roket Nusantara 37 – 39

PENGANTAR REDAKSI



Salam Literasi,

Para Pembaca Majalah Dekade, Yang Terhormat, kembali Penerbit CV. Tom'S Book Publishing menerbitkan Majalah Dekade untuk volume 1 Nomor 05, Maret 2025. Terbitnya Majalah Dekade ini sebagai upaya ikut serta meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, melalui bacaan yang mengedukasi.

Selain hadir dalam bentuk cetakan juga dapat dibaca melai website <https://majalahdekade.tomsbook.co.id>. Ketersediaan melalui online ini sebagai bentuk kesiapan CV. Tom'S Book Publishing terhadap kemajuan teknologi, serta mengakomodir minat masyarakat yang memerlukan bacaan secara online.

Semoga kehadiran Majalah Dekade ini dapat diterima oleh masyarakat dan bermanfaat, serta diharapkan bisa menjadi media bagi masyarakat untuk berkreasi dalam dunia literasi.

Demikian, *Salam Literasi*.

Sanggau, Maret 2025

Dewan Redaksi

**Dasawarsa Courant Pre-Launching
Buku Haji Rais Abdoerracman**



Tomji, S.Pd., M.E., penulis buku Goesti Soeloeng Lelanang menyampaikan materinya di acara Pre-Launching, pada Sabtu, 1 Maret 2025

Dasawarsa Courant Pre-Launching Buku Goesti Soeloeng Lelanang

Kubu Raya, Dasawarsa Courant – Dalam rangka peluncuran buku Goesti Soeloeng Lelanang yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2025, Media Dasawarsa Courant berkerjasama dengan CV. Tom'S Book Publishing menggelar Pre-Launching di kantor Redaksi Dasawarsa Courant di Komplek Mega Griya, Jalan Raya Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pada Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 16.00 – 18.00, diikuti oleh pegiat Kolektor Media Lawas (Komal) dari berbagai daerah.

Goesti Soeloeng Lelanang merupakan pejuang Kalimantan Barat berasal dari daerah Ngabang. Gusti Sulung Lelanang merupakan salah seorang yang diasingkan ke Boven Digoel karena keberaniannya melawan penjajah Hindia Belanda. Sehingga untuk mengingat perjuangannya didirikanlah monumen "Tugu Digulis". Tugu berbentuk

bambu runcing yang berjumlah 11 buah menandakan bahwa ada 11 pejuang dari Kalimantan Barat yang pernah diasingkan ke Boven Digoel.

Goesti Soeloeng Lelanang memiliki kekerabatan dengan Kerajaan Landak dari ayahnya, Pangeran Laksamana Gusti Mahmud. Sebagai keturunan bangsawan, ia dapat mengenyam pendidikan di Hollandsche Indische School (HIS) Jatinegara, Batavia. Sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar itu setara dengan Sekolah Dasar yang dapat ditempuh 6-7 tahun.

Perjuangan Gusti Sulung Lelanang berakhir ketika Jepang masuk ke Kalimantan Barat. Semua sekolah yang pernah ia rintis ditutup kecuali beberapa sekolah yang menurut Jepang boleh tetap beroperasi. Akhir hayat Gusti Sulung Lelanang terungkap pada pemberitaan Koran Borneo Shinbun 28 Juni 1944, ia bersama ribuan kaum cendekiawan di Kalimantan Barat ini dibunuh oleh Jepang.

Pada acara Pre-Launching tersebut, Tomi, S.Pd.,M.E., sebagai penulis buku Goesti Soeloeng Lelanang menyampaikan dalam paparan materinya, bahwa buku Goesti Soeloeng Lelanang ini banyak memberikan informasi tentang kondisi dan situasi Kalimantan Barat pada masa kolonial Belanda, khususnya sejarah lahirnya pers di Kalimantan Barat.

“Buku ini mengulas tentang permulaan lahirnya pers di Kalimantan Barat. Selain itu juga terdapat beberapa tulisan Goesti Soeloeng Lelanang tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, yang bisa menjadi rujukan untuk penulisan sejarah”, demikian Tomi menjelaskan.

Acara Pre-Launching yang bertepatan dengan hari pertama puasa Ramadhan tahun 2025 itu, dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama dan Sholat Maghrib berjamaah. Setelah itu dilanjutkan diskusi tentang rencana peluncuran buku Goesti Soeloeng Lelanang bulan depan. Kemudian ditutup dengan sholat Isya dan Tarawih berjamaah.

Diakhir acara, Tomi yang ditemui media ini menyampaikan harapannya agar dengan terbitnya buku Goesti Soeloeng Lelanang ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pegiat sejarah tentang Kalimantan Barat. Karena cukup banyak tulisan-tulisan yang di

publikasikan pada masa itu yang menjelaskan tentang sejarah di Kalimantan Barat.

“Saya berharap, buku Goesti Soeloeng Lelanang ini bisa menjadi salah satu referensi bagi pegiat dan penulis sejarah dalam menulis sejarah tentang Kalimantan Barat. Khususnya tentang sejarah hubungan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Begitu juga buku Haji Rais Abdoerracman yang telah siap untuk di Launching, yang sebelumnya telah direncanakan untuk di Launching bulan Januari 2025 lalu, tetapi terkendala karena pihak penerbitnya mendahulukan persiapan Launching media Exclusive News. Semoga saja bulan April nanti kedua buku tersebut bisa di Launching secara bersamaan”, ujar Tomi. *(Red)*

Sejumlah Kepala Sekolah di Sungai Kakap Ingin Mengundurkan Diri Terkait Pelaporan Dana BOS



Kubu Raya, Dekade – Sejumlah kepala sekolah di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dikabarkan ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Beban administratif terkait pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dianggap memberatkan menjadi alasan utama di balik rencana pengunduran diri tersebut.

Keluhan terkait kompleksitas pelaporan dana BOS kembali mencuat. Di Kecamatan Sungai Kakap, beberapa kepala sekolah merasa tertekan dengan aturan pelaporan yang dinilai terlalu detail dan berisiko tinggi.

Mereka khawatir jika terjadi kesalahan administratif, sanksi dapat dijatuhkan, meskipun tidak ada unsur kesengajaan. Situasi ini membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus laporan keuangan dibanding mengelola sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan.

“Pemerintah perlu mengevaluasi regulasi laporan dana BOS agar tidak semakin menyulitkan kepala sekolah. Menurutnya, kepala sekolah bukan tenaga administrasi atau akuntan, sehingga diperlukan sistem yang lebih sederhana namun tetap transparan dan akuntabel.” Ujar Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Sungai Kakap, Agus Anwari, S.Pd, SD., MM, didampingi Ketua K3S, Saat di temui di kantornya, Rabu (5/3/2025).***

1 Ramadan 1446 H ditetapkan Pemerintah Jatuh pada 1 Maret 2025



Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan ketetapan sidang isbat bahwa 1 Ramadan 1446 H bertepatan dengan 1 Maret 2025, pada Jumat (28/2/2025)

Jakarta, Dekade- Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H/2025 M jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1446 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

“Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1446 H.

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag pada tanggal 28 Februari 2025 M,” ungkap Menag.

Menag menjelaskan, berdasarkan paparan, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk berkisar antara 3° 5.91’ (tiga derajat lima koma sembilan puluh satu menit) hingga 4° 40.96’ (empat derajat empat puluh koma sembilan puluh enam menit). Sementara itu, sudut elongasi 4° 47.03’ (empat derajat empat puluh

tujuh koma nol tiga menit) hingga $6^{\circ} 24.14'$ (enam derajat dua puluh empat koma empat belas menit).

Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1446 H, pada hari rukyat 29 Sya'ban 1446 H/28 Februari 2025 M posisi hilal di wilayah NKRI ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum $6,4^{\circ}$. Ini sesuai dengan kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2021 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Menag mengungkapkan, terutama di wilayah Barat Laut di Provinsi Aceh NKRI termasuk di Sabang dan Banda Aceh telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS ($3-6,4^{\circ}$). Oleh karenanya menjelang awal Ramadan 1446 H pada hari rukyat di daerah yang telah memenuhi imkan rukyat ini secara teoritis memungkinkan hilal awal Ramadan 1446 H dapat dirukyat.

Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag. Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 125 titik di Indonesia. "Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua. Di 125 titik tersebut, tadi dilaporkan oleh Dirjen Bimas Islam, bahwa ada dua perukyah di Aceh yang melihat hilal. Keduanya juga telah disumpah atas pernyataannya tersebut," ujar Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

"Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati 1 Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025," tegas Menag.

"Dengan penetapan ini, kami berharap seluruh umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekhayusan," tutur Menag.

Menag berharap Ramadan kali ini dapat memberikan energi positif yang penuh kebaikan bagi perjalanan bangsa. "Ramadan bukan hanya sekedar hubungan vertikal. Tapi juga tentang kasih sayang kepada sesama. Sebab seorang muslim sejati tidak hanya bercermin kepada

Tuhan. Tetapi juga kepada manusia dan lingkungan sekitarnya,” pesan Menag.

“Ramadan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya pada apa yang kita genggam, tetapi pada apa yang kita lepaskan, seberapa tulus yang kita bagikan. Ramadan telah datang, mari kita sambut dengan cinta. Penuhi dengan ibadah dan jadikan setiap detik sebagai perjalanan menuju cahaya. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan, Marhaban ya Ramadan,” tutup Menag. (*Red*)

**Sindiran Putra Mahkota Solo di Medsos 'Nyesel Gabung Republik'
jadi Sorotan**



Putra Mahkota Keraton Solo, KGPA Hamengkunegoro, menjadi sorotan menyusul unggahannya di media sosial

Solo, Dekade – Putra Mahkota Keraton Solo mengkritik pemerintah pusat melalui unggahan di medsos. Kata-kata 'Nyesel gabung Republik' yang dilontarkannya menjadi sorotan saat narasi 'Indonesia Gelap' masih bergulir.

Pekan lalu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPA) Hamengkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram itu mengunggah dua postingan di akun Instagram pribadinya.

Dengan latar belakang hitam, unggahan tersebut bertuliskan "Nyesel Gabung Republik" dan "Percuma Republik Kalau Cuma untuk Membohongi".

Kedua postingan sudah dihapus, tetapi tangkapan layarnya dibagikan ulang di media sosial dan menjadi viral.

KGPA Hamengkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram adalah putra dari Pakubuwono XIII dengan permaisuri GKR Pakubuwono, yang berusia 22 tahun. Dia diangkat menjadi putra mahkota pada tanggal 22 Maret 2022.

Pihak Keraton Kasunanan Surakarta, melalui Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Pangeran Aryo (KPA) Dany Nur Adiningrat, mengklarifikasi unggahan viral itu dalam konferensi pers di kompleks Keraton pada Senin (03/03).

Dany, yang membacakan pernyataan resmi KGPA Hamengkunegoro, menyebut kedua postingan itu tidak lepas dari berbagai unggahan putra mahkota sebelumnya terkait situasi di Indonesia.

Salah satu isu yang disebut Dany adalah kasus oplosan BBM Pertamina yang menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat.

"Ekspresi kekecewaan (KGPA Mangkunegoro) tersebut (dia) tuangkan dalam unggahan di akun Instagram pribadi (...) yang salah satunya memuat pernyataan mengenai penyesalan bergabung dengan Republik."

"Pernyataan tersebut bukanlah cerminan dari hilangnya semangat nasionalisme, patriotisme, atau jiwa bela negara dalam diri (dia), melainkan suatu bentuk kritik dan sindiran terhadap para penyelenggara saat ini," ujar Dany membacakan pernyataan klarifikasi dari KGPA Hamengkunegoro.

Dany menyebut, unggahan itu juga bertujuan untuk menyoroti tata kelola pemerintahan saat ini yang jauh dari harapan leluhur raja-raja Keraton Surakarta yang dulu berperan dalam perjuangan kemerdekaan.

"Seharusnya para pemimpin negara memiliki kesadaran moral dan etika dalam mengelola pemerintahan demi kepentingan rakyat banyak," tegasnya.

Adapun unggahan "Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi", sambung dia, terkait dengan sikap pemerintahan yang dianggap melupakan jasa Keraton yang telah menyerahkan kedaulatan dan bergabung dengan Indonesia.

Di sisi lain, Dany menekankan unggahan KGPA Hamengkunegoro merupakan "bahasa satir".

"Ini adalah bahasa satir, bukan soal menyesal atau membohongi, tapi ini adalah kritikan," ujarnya.

Sebelumnya, Dany menghimbau agar pemerintah menanggapi kritik dari KGPA Hamengkunegoro dengan cerdas.

"Ini adalah unggahan yang satir, yang baik dari beliau. Pemerintah harus menangkap pesan ini dengan lugas dan cerdas," katanya.

"Seorang putra mahkota Keraton Surakarta yang merupakan pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tentu tidak akan berbicara sembarangan. Ini adalah peringatan keras yang harus didengar."

Dalam pernyataannya, Dany menyebut Keraton Surakarta adalah satu-satunya penerus dinasti yang tidak menjadi bagian dari pemerintahan.

"Hanya Keraton Surakarta satu-satunya dari Majapahit, dari Mataram Islam, yang bukan (bagian) pemerintahan. Kalau bagian dari pemerintahan mengkritik, kan, tidak etis," ujarnya.

Ketika ditanya apakah kata "membohongi" dalam postingan itu terkait dengan wacana pengembalian status daerah istimewa Surakarta, Dany menyebut ada hak-hak keraton Surakarta yang masih ditangguhkan.***

Sejarah Kasunanan Surakarta Bergabung ke Republik Indonesia



*KGPA Hamengkubuwono bersama dengan Raja Pakubuwono XII dan permaisuri
serta KGPA Mangkunegara X*

Solo, Dekade – Bagaimana sejarah Kasunanan Surakarta mendukung dan bergabung ke Republik Indonesia pada 1945?

Kasunanan Surakarta sejatinya lebih dulu bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibandingkan Kesultanan Yogyakarta. Hal itu dipaparkan sejarawan UGM, Dr. Sri Margana, pada Senin, 3 Maret 2025.

"Sebetulnya yang paling pertama malah Surakarta, bukan Yogyakarta, yang menyatakan diri menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 5 September 1945," ujar Sri Margana.

Sri Margana menyebut Keraton Surakarta adalah satu dari empat wilayah swapraja di bawah Hindia Belanda yang menyatakan bergabung ke Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945.

Keempat wilayah swapraja diakui otonominya itu adalah Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman.

Serangan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan membuat pemerintah saat itu memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada Januari 1946.

Pada saat yang bersamaan, di Surakarta, muncul gerakan anti-swapraja dari kelompok-kelompok kiri yang anti-feodalisme.

Sri Margana menjelaskan mereka menentang Keraton Surakarta yang masih memilih pejabat-pejabat daerah yang sebelumnya sudah berkuasa pada era kolonial.

Hal ini pun memunculkan gejala sosial di daerah tersebut yang antara lain diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan terhadap patih dan pembakaran kantor-kantor pemerintahan.

Akhirnya, pada Juli 1946, status keistimewaan Surakarta kemudian ditanggihkan pemerintah pusat.

Menurut Sri Margana, gerakan seperti itu tidak terjadi di wilayah-wilayah yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII karena kepemimpinan keduanya dinilai pro-republik.

"Ya, sebenarnya membandingkan juga enggak fair ya karena mereka menghadapi reaksi politik yang berbeda," ujarnya.

Sri Margana menjelaskan Surakarta telah beberapa kali berusaha mengembalikan status keistimewaannya, tetapi tidak berhasil.

"Nah, kalau penyesalan bergabung itu maksudnya adalah itu kurang lebih secara historis latar belakangnya itu," ujar Sri Margana.

"Kita tidak tahu apakah ada janji-janji yang diberikan oleh pemerintah kepada Kasunanan Surakarta."

Di sisi lain, Sri Margana menyebut aset-aset Keraton Solo yang digunakan oleh pemerintah daerah perlu diperjelas status hukumnya.

Keraton Surakarta, sambung dia, memiliki hak historis terhadap wilayahnya, sehingga pemerintah perlu membicarakan status aset-aset tersebut dengan jelas.

Sementara itu, Pegiat sejarah dan Ketua Komunitas Solo Societeit, Dani Saptoni, menyebut masyarakat setempat sebenarnya "sudah tidak

ambil pusing" dengan kondisi Keraton karena "jengah dengan berita-berita konflik internal yang sering terjadi".

"Kita yang di Solo itu mengharapkan Keraton sebagai tempat dimana keselarasan itu ada. Tetapi kenyataannya kita tidak bisa begitu. Karena apa? Konflik internal yang terus berkepanjangan dan tidak ada ujungnya yang terjadi di Keraton," ujar Dani pada Senin, 3 Maret 2025.

Dani merujuk ke konflik internal di Keraton Surakarta berlangsung sejak wafatnya Pakubuwono XII pada 2004.

Tanpa adanya penunjukan resmi penerus tahta, perebutan kekuasaan pun terjadi di antara anggota keluarga kerajaan.

Perpecahan ini melahirkan dua kubu utama, yakni pihak yang mendukung KGPH Hangabehi sebagai raja dan pihak yang mendukung KGPH Tedjowulan.

Perselisihan ini semakin memperumit situasi internal Keraton, menyebabkan ketidakstabilan dalam pengelolaan adat dan budaya Jawa yang diwariskan turun-temurun.

Selain masalah suksesi, konflik juga dipicu oleh sengketa aset keraton, termasuk tanah, bangunan, dan benda-benda pusaka bersejarah.

Sejumlah pihak di dalam keluarga kerajaan saling klaim hak kepemilikan terhadap aset-aset tersebut, yang berujung pada berbagai aksi protes, penguncian akses bangunan keraton, serta intervensi dari pemerintah daerah yang berujung rekonsiliasi pada 2023.

Sejarawan UGM Sri Margana mengakui konflik yang berkepanjangan ini berdampak pada "karisma" Keraton Solo.

"Karismanya itu semakin menurun karena adanya konflik internal. Karena konflik internal itu, aib-aib Keraton jadi keluar, kan?" jelasnya.

Di sisi lain, Sri Margana menilai wajar generasi sekarang memiliki pandangan berbeda terhadap Keraton.

"Sebenarnya kalau masyarakat yang tradisional, apalagi yang generasi tua, masih tetap menghormati Keraton itu," ujarnya.

Dani dari Solo Societeit menilai masyarakat Solo, khususnya kalangan akademisi, akan memandang KGPA Hamengkunegoro sebagai orang yang "peka terhadap zaman" lewat unggahannya.

"Dia peduli dan simpati terhadap kegaduhan yang ada di negeri," ujar Dani.

Dani menambahkan, ekspresi kekecewaan KGPA Hamengkunegoro tersebut mempertegas kejengahan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

"Karena akhirnya semua lapisan masyarakat mengeluarkan satu pernyataan yang kontra dengan pemerintah," ujar Dani.

"adalah bentuk ungkapan protes terhadap situasi yang tidak mapan yang terjadi di negara kita. Karena banyaknya regulasi yang ternyata menimbulkan ketimpangan di arus bawah."

Namun, lagi-lagi, Dani menyebut pernyataan Putra Mahkota Solo itu hanya akan menjadi "riak-riak kecil" saja.

"Keraton sudah tidak populer," tekannya.

"Keraton tidak lagi memiliki otoritas politik. Dia hanya sebatas sebagai simbol pusat kebudayaan Jawa."

Dani menyebut unggahan KGPA Hamengkunegoro bisa dikatakan "gegabah" dari sisi sejarah karena bagaimanapun itu adalah "takdir sejarah".

"tidak mewakili perasaan masyarakat Surakarta. Itu hanya personal dari lingkaran Keraton," ujarnya.

Terpisah, sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rezza Dian Akbar, menilai unggahan Putra Mahkota Solo itu hanya akan viral sesaat dan tenggelam.

Di sisi lain, orang akan menyoroti sosok putra mahkota yang punya posisi penting secara kultural dan tinggal di kota yang sama dengan mantan Presiden Jokowi.

"Ini menjadi penting dalam hingar bingar politik saat ini, ketika legitimasi pemerintah ada di posisi terendah di mata masyarakat," ungkapnya.

Meski begitu, sejarawan UGM Sri Margana menilai apa yang dilakukan KGPA Hamengkunegoro bisa saja saja merupakan upaya mengembalikan reputasi Keraton Surakarta.

"Saya kira Putra Mahkota mencoba untuk membangun kembali reputasi Keraton dulu yang memang luar biasa. Dalam sejarah, kita

mengenal banyak Raja-Raja Surakarta yang anti-kolonial seperti Pakubuwana IV yang melawan VOC dan Pakubuwana VI yang mendukung Pangeran Diponegoro," ujarnya.

Sri Margana menambahkan pemerintah pusat perlu memperhatikan pernyataan yang dilontarkan anggota Keraton.

"Bayangkan kalau calon Raja atau Putra Mahkota sudah mulai bertutur. Dalam filsafat Jawa itu, sekali diucap, dia tidak boleh menelan ludahnya sendiri. Dan oleh karena itu Raja itu sangat berhemat dalam berbicara, dia hanya akan berbicara hal-hal yang sangat penting," ujar Margana.

"Kalau raja berbicara atau bersabda, sesingkat apapun, itu bagi orang Jawa itu sesuatu yang sangat penting."

Margana menilai masyarakat seharusnya mendukung pernyataan KGPA Hamengkunegoro yang dinilainya mewakili perasaan dari sebagian besar masyarakat Indonesia.

"Masyarakat ada yang merasa bahwa banyak janji-janji pemerintah itu yang belum bisa ditepati, baik oleh rezim sekarang maupun yang sebelumnya." ***

Putra Mahkota Keraton Surakarta Enggan Minta Maaf Terkait Unggahan 'Nyesel gabung Republik'



Putra Mahkota Keraton Surakarta Enggan Minta Maaf Terkait Unggahan 'Nyesel gabung Republik'

Surakarta, Dekade— Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, KGPA Hamengkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, tidak akan meminta maaf terkait pernyataan 'Nyesel gabung Republik' yang ia unggah di Instagramnya [@kgpaa hamangkunegoro](#).

KGPA Hamengkunegoro mengaku, unggahannya tersebut tidak lepas sebagai penyikapan atas perkembangan situasi terkini, salah satunya kasus Pertamina.

"Khususnya terkait pemberitaan mengenai kasus Pertamina, yang telah menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat, termasuk bagi saya sebagai bagian generasi muda," ungkap KGPA Hamengkunegoro lewat pernyataan tertulis yang dibacakan oleh Pangageng Sasana Wilopo Keraton Kasunanan, KPH Dani Nur Adiningrat, Senin (3/3/2025).

Menurut pria bernama asli KGPH Purbaya ini, pernyataannya itu bukan sebagai cerminan dari hilangnya semangat nasionalisme, patriotisme, atau jiwa bela negara dari dirinya. Melainkan sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintah.

"Melainkan suatu bentuk kritik dan sindiran terhadap penyelenggara negara saat ini," lugas putra Pakubuwono (PB) XIII tersebut.

Dia melatarbelakangi, unggahan yang bersifat satire itu sebagai sikap kebatinan mendalam, mengingat fakta sejarah bahwa leluhurnya memiliki kontrobusi yang besar dalam perjuangan kemerdekaan dan berdirinya NKRI.

"Di antaranya PB VI dan PB X yang sudah diakui sebagai pahlawan nasional, dan PB XII yang sukarela menggabungkan negeri yang berdaulat dalam NKRI, bahkan menyerahkan harta benda dan kekuasaannya demi tegaknya NKRI yang pada saat itu masih tahap awal pembangunan," kata dia.

"Seharusnya para pemimpin negara memiliki kesadaran moral dan etika dalam mengelola pemerintahan demi kepentingan rakyat banyak," sambung dia.

Meski dikenal dekat dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, KGPAA Hamengkunegoro menegaskan bukan berarti ia tidak berani melakukan kritik.

"Ini demi kebaikan pemerintah yang dia cintai, dan demi masa depan Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.***

Lagi... dan lagi... Profesi Guru diKriminalisasi, Guru Al-Azhar Pontianak Dijadikan Tersangka karena Disiplinkan Siswa, Dugaan diKriminalisasi oleh Oknum Orang Tua yang Berdinasi di Propam Polda Kalbar



Muhammad Saelan, Guru SD Islam Al Azhar 21 Pontianak, diduga diKriminalisasi oleh oknum orang tua yang berdinasi di Propam Polda Kalbar

Pontianak, Dekade – Nasib malang menimpa Muhammad Saelan, Guru Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 21 Pontianak. Teguran yang diberikannya kepada salah satu siswi kini harus berujung pada status tersangka di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar). Lantaran orang tua siswi yang merupakan seorang aparat kepolisian tidak terima atas teguran yang diberikan oleh Muhammad Saelan kepada anaknya.

Padahal menurut pengakuan Saelan teguran yang dilakukan masih dalam batas wajar untuk mendisiplinkan siswa. Namun tindakan tersebut yang menghantarkannya kini harus menyandang status tersangka akibat teguran yang dilakukan kepada siswinya.

Tak hanya berhenti disitu kejanggalan lainnya muncul pada peristiwa ini. Jarak waktu kejadian dengan penetapan status tersangka yang cukup panjang pun menjadi pertanyaan publik.

Teguran yang dilakukan Muhammad Saelan terhadap siswa ini dilakukan pada November 2023 lalu. Sementara dirinya ditetapkan sebagai tersangka baru pada Februari 2025.

Peristiwa ini pun menyita perhatian publik ramai lantaran teguran yang dilakukan seorang guru disekolah seharusnya diambil sisi positif.

Terutama untuk mendisiplinkan siswa bukan malah dilaporkan kepada pihak kepolisian yang berujung penetapan status tersangka kepada seorang guru. Profesi orang tua siswi pelapor yang merupakan seorang aparat kepolisian juga menjadi sorotan dalam kasus ini.

Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan apakah kasus ini murni berjalan atau karena paksaan. Karena status profesi orang tua siswi pelapor yang merupakan aparat kepolisian.

Kronologis Peristiwa

Untuk mencari keadilan Muhammad Saelan akhirnya menyambangi Kantor salah satu Media Harian untuk membuat pengaduan. Media Harian ini memang memiliki program khusus yang membuka pengaduan untuk seluruh masyarakat. Berbagai lapisan masyarakat telah memanfaatkan program tersebut.

Muhammad Saelan menceritakan kejadian berawal pada 28 November 2023 lalu di Laboratorium Komputer SD Islam Al Azhar 21 Pontianak. Ia tengah mengambil nilai seorang murid yang belum diambil nilainya.

Sementara siswa lain diminta untuk mengerjakan tugas Puzzle Time tentang ilmu pengetahuan alam. Namun suasana siswa sedikit gaduh dan ribut sehingga dia harus mendisiplinkan untuk menenangkan para siswa.

Namun setelah itu suasana kembali riuh sementara dirinya tengah mengambil nilai siswa. Lalu ia menegur para siswa sampai tiga kali untuk mengingatkan mereka agar tidak ribut.

“Saya tegur sampai sudah tiga kali jangan ribut bapak sedang mengambil nilai kawan mereka ini,” ungkap Muhammad Saelan saat menceritakan peristiwa tersebut.

Kemudian ia memandang satu persatu siswa siswi untuk mendisplinkan mereka. Para siswa yang lain menundukkan kepala mereka namun pada siswi pelapor ini dirinya malah memelototi sang guru Muhammad Saelan. Didalam penafsiran Saelan siswi ini melawan tegurannya.

Lantaran siswa siswi lain saat ditegur olehnya mereka menundukkan kepala sementara siswi pelapor ini malah memelototi dirinya yang merupakan seorang guru. Lantas Muhammad Saelan menanyakan kepada siswi tersebut kenapa dirinya memelototi ia yang seorang guru.

“Saya tanyakan kenapa dia memelototi saya tidak terima atau melawan, lalu saya tegur, kenapa kamu melawan, bapak ini guru, orang tua kamu disekolah saya bilang gitu kenapa kamu tidak terima sementara yang lain dimarahi menundukkan kepala,” kata Saelan.

Laporan kawan-kawannya siswi ini saya dikatakan menampar tiga kali dan terdengar suaranya. Sementara seingat, saya hanya sedikit menepuk tangan dan menyentuh pipinya menggunakan jari seperti itu, saksinya murid-murid saya,” sambungnya.

Keesokan harinya pada 29 November 2023 ada pertemuan yang dihadiri oleh orang tua siswi ini beserta neneknya di ruangan kepala sekolah dengan kondisi siswi ini yang tidak ada apa-apa.

Muhammad Saelan pun menjelaskan kronologis sebenarnya yang terjadi. Mulai dari alasan dirinya marah hingga menegur siswi tersebut.

“Saya hanya sedikit menepuk tangan dan menyentuh pipinya menggunakan jari tapi menurut kawan-kawannya siswi ini saya menampar tiga kali sampai terdengar suaranya,” kata Muhammad Saelan.

Atas peristiwa tersebut akhirnya Muhammad Saelan menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua siswi ini melalui guru kelas, wali kelas dan wakil kepala sekolah.

Setelah itu pada awal Desember dirinya juga memenuhi panggilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar.

Pada kesempatan itu ia juga sudah membuat pernyataan permohonan maaf yang direkam juga oleh komisioner KPAID. Lalu pada 12 Januari 2024 dilakukan mediasi di Polda Kalbar, Muhammad Saelan ditemani oleh Kepala Sekolah untuk hadir.

Namun mediasi ini gagal lantaran orang tua siswi ini tidak mau memaafkan. Kemudian pada 15 Januari 2024 Muhammad Saelan berinisiatif untuk menyambangi kediaman orang tua murid ini, "saya minta maaf secara pribadi", tuturnya.

Sebelum datang Muhammad Saelan bahkan terlebih dahulu berkirim pesan whatsapp kepada orang tua siswi ini. Untuk menyampaikan tujuan ia ingin bersilaturahmi ke rumah dan disambut baik.

"Sesampainya saya dirumah orang tua murid ini saya sampaikan permintaan maaf secara langsung, kita sudah sampai bersalaman berpelukan saya pikir dengan sudah berpelukan bersalaman ini sinyal yang baik orang tua anak ini sudah memaafkan saya setelah itu kita ngobrol panjang dan situasinya sudah mencair," jelas Muhammad Saelan.

Namun seiring perjalanan waktu ternyata laporan kepolisian orang tua siswi ini terhadap dirinya ternyata tidak dicabut. Kemudian pada pertengahan Maret ia kembali menyampaikan pesan whatsapp kepada orang tua murid ini berharap kasus ini bisa diselesaikan. Akan tetapi pesan yang disampaikan tidak mendapatkan respon.

"Saya pikir dengan saya sudah pergi ke rumahnya sudah bagus ternyata seiring berjalan waktu pada Desember kepala sekolah saya memberitahu ternyata orang tua siswa ini masih melanjutkan perkara tidak dicabut. Saat itu saya kaget ternyata belum dicabut," kata Muhammad Saelan.

Lantas seiring berjalan waktu pada 21 Februari 2025 ini ia diperiksa sebagai saksi terlapor sampai ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan status sebagai tersangka membuat dirinya terkejut lantaran ia telah memiliki niat baik untuk meminta maaf secara pribadi

kepada orang tua siswi ini. Bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka Muhammad Saelan bersama sang istri telah dua kali ke kediaman orang tua siswi ini akan tetapi tidak berhasil bertemu.

Selain itu para guru-guru, kepala sekolah hingga pihak yayasan pun juga sudah ke sana juga untuk bertemu.

“Saya pikir dengan beberapa kali permohonan maaf akan dimaafkan jadi saya bingung dengan situasi ini, tindakan yang saya ambil itu untuk mendisiplinkan murid dan tidak terjadi apa-apa sebenarnya,” ujar Muhammad Saelan.

Dari kejadian ini penegakan hukum di Indonesia ini masih perlu ditanyakan karena setiap individu termasuk guru berhak mendapatkan hukum yang adil, yang mana hukum ini harus menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa keputusan yang di ambil didasari dengan bukti, dan sistem hukum juga harus mempertimbangkan konteks dan fakta di setiap kasus.

Selain itu, masalah ini menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam dunia pendidikan, khususnya terkait hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Pemerintah, melalui kebijakan pendidikan, perlu menetapkan panduan yang memastikan pengajar dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut terhadap ancaman aturan yang tidak adil.

Regulasi tersebut juga harus meliputi prosedur pengaduan dan mediasi yang transparan, dimana setiap perseteruan antara pengajar, murid, dan orang tua dapat diselesaikan secara profesional tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan adanya aturan yang jelas, pengajar akan merasa lebih terlindungi dalam menjalankan perannya.

Keprihatinan Dunia Pendidikan

Kasus ini menuai kecaman dari berbagai pihak, mengingat tuduhan yang dialamatkan kepada sang guru dinilai tidak valid berdasarkan hasil visum yang menunjukkan tidak adanya tanda-tanda kekerasan.

Menurut informasi yang beredar, laporan terhadap guru tersebut bermula dari sebuah insiden di lingkungan sekolah yang seharusnya dapat diselesaikan secara internal.

Sang guru bahkan telah menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf kepada pihak keluarga siswa. Namun, kasus ini tetap berlanjut ke jalur hukum, memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pelapor.

Sejumlah komunitas pendidikan dan organisasi guru menilai bahwa tindakan ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Mereka menegaskan bahwa guru seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya dan tidak boleh menjadi korban kriminalisasi yang tidak berdasar.

“Hasil visum sudah jelas membuktikan tidak adanya kekerasan, dan guru tersebut juga sudah meminta maaf. Tidak ada alasan untuk kasus ini terus dipaksakan ke ranah hukum,” ujar salah satu perwakilan komunitas pendidikan setempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah dan berbagai pihak terkait masih berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus ini.

Sementara itu, banyak pihak yang menunggu tanggapan resmi dari Polda Kalbar terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam perkara ini.

Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para tenaga pendidik, agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa takut dikriminalisasi atas tuduhan yang tidak berdasar.

Pemerhati anak dan perempuan, Dewi Aripurnamawati mengatakan, terkait adanya laporan dugaan kekerasan terhadap anak dengan terlapor seorang guru komputer di Yayasan Al-Azhar mestinya tidak perlu sampai ke ranah hukum, apalagi sudah beberapa kali ada pertemuan dan guru tersebut juga sudah meminta maaf berulang kali.

“UUPA memang Lex Spesialis namun harus dilihat akar permasalahan yang sebenarnya terjadi, hasil visumnya bagaimana? Jika tindakan guru tersebut bertujuan untuk mendidik dan membina mestinya tidak bisa dinaikkan perkara ini,” katanya.

“Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no.1554 K/Pid/2013 yang menyebutkan guru tidak bisa dipidana saat

menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa,” tambahnya.

“Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 sebagai aturan turunan dari Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan perlindungan terhadap profesi guru,” papar Dewi.

Sementara itu Penasehat Hukum Muhammad Saelan, Roliasnyah berharap perkara ini tidak berlanjut hingga ke meja hijau. Menurutnya, kasus ini terlalu dilebih-lebihkan dan sebaiknya tidak diteruskan ke Kejaksaan.

Ia menekankan kliennya adalah seorang guru yang masih aktif mengajar. Jika kasus ini sampai ke persidangan, akan ada konsekuensi yang cukup menyulitkan, terutama karena kliennya harus bolak-balik menghadiri sidang.

“Harapan kami, kasus ini bisa diselesaikan tanpa sidang. Namun, jika tetap berlanjut ke pengadilan, kami siap menghadapinya,” jelasnya.

Ia juga menilai bahwa permasalahan yang terjadi seharusnya dipahami dalam konteks pendidikan, bukan sebagai tindakan yang didasari oleh emosi semata.

Pihaknya berharap ada solusi terbaik agar tidak merugikan berbagai pihak, terutama dalam dunia pendidikan.

“Menurut saya, kasus ini terlalu dilebih-lebihkan. Kejadian ini terjadi dalam rangka mendidik anak, bukan karena faktor emosional,” tegasnya. *(Red)*

**Respon Ketua PGRI Provinsi Kalbar Terhadap Penetapan Status
Tersangka Guru SD Islam Al Azhar 21 Pontianak,
Muhammad Saelan**



Ketua PGRI Kalbar, Muhammad Firdaus, tegaskan guru tak bisa dipidana saat menjalankan tugas mendisiplinkan siswa

Pontianak, Dekade – Pengurus Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia (PP-PGRI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan respon keras atas penetapan status tersangka guru Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 21 Pontianak, Muhammad Saelan.

PGRI Kalbar menyangkan langkah hukum ini, mengingat seorang guru seharusnya tidak bisa dipidana saat menjalankan tugasnya untuk mendisiplinkan siswa.

Hal itu diungkapkan Ketua PGRI Provinsi Kalbar Muhammad Firdaus pada Rabu, 19 Maret 2025. Firdaus mengungkapkan guru tidak bisa dipidana selama menjalankan profesinya dalam rangka pendisiplinan siswa. Hal ini bahkan telah dipertegas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang dipedomani.

“Perlu diketahui, guru tidak dapat dipidana selama menjalankan profesinya dalam rangka mendisiplinkan siswa. Ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,” ujar Ketua PGRI Provinsi Kalbar Muhammad Firdaus.

Ia menilai kasus ini seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui pihak sekolah, apalagi jika tidak ada bukti konkret terkait dugaan tindak kekerasan.

“Kita bisa lihat dari visum dan bukti lainnya. Kalau memang ada kekerasan, itu persoalan lain. Tapi kalau tidak ada bukti yang kuat, mestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” lanjutnya.

Kasus ini sendiri bermula sejak 2023 dan baru pada 2025 ditetapkan status tersangka. PGRI mempertanyakan alasan di balik lamanya proses hukum ini.

“Ini kan proses panjang, dari 2023 sampai sekarang baru ditetapkan tersangka. Ada apa sebenarnya? Kenapa bisa naik dari saksi jadi tersangka?”, katanya.

PGRI Kalbar berharap kasus serupa tidak terulang di masa depan. Mereka khawatir, jika kasus seperti ini terus terjadi, para guru akan merasa terancam saat mencoba mendisiplinkan siswa demi membentuk karakter anak bangsa.

“Kalau setiap upaya mendisiplinkan siswa berujung pada ancaman hukum, guru bisa jadi takut. Padahal, hukuman atau disiplin yang diberikan bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan generasi penerus bangsa,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan nasib malang menimpa Muhammad Saelan, Guru Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 21 Pontianak.

Teguran yang diberikanya kepada salah satu siswi kini harus berujung pada status tersangka di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar).

Lantaran orang tua siswi yang merupakan seorang aparat kepolisian tidak terima atas teguran yang diberikan oleh Muhammad Saelan kepada anaknya.

Padahal menurut pengakuan Saelan teguran yang dilakukan masih dalam batas wajar untuk mendisiplinkan siswa.

Namun tindakan tersebut yang menghantarkan dirinya kini harus menyandang status tersangka akibat teguran yang dilakukan kepada siswi. Tak hanya berhenti disitu kejanggalan lainnya muncul pada peristiwa ini.

Jarak waktu kejadian dengan penetapan status tersangka yang cukup panjang pun menjadi pertanyaan publik.

Teguran yang dilakukan Muhammad Saelan terhadap siswa ini dilakukan pada November 2023 lalu. Sementara dirinya ditetapkan sebagai tersangka baru pada Februari 2025.

Peristiwa ini pun menyita perhatian publik ramai lantaran teguran yang dilakukan seorang guru disekolah seharusnya diambil sisi positif.

Terutama untuk mendisiplinkan siswa bukan malah dilaporkan kepada pihak kepolisian yang berujung penetapan status tersangka kepada seorang guru.

Profesi orang tua siswi pelapor yang merupakan seorang aparat kepolisian juga menjadi sorotan dalam kasus ini.

Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan apakah kasus ini murni berjalan atau karena paksaan. Karena status profesi orang tua siswi pelapor yang merupakan aparat kepolisian. *(Red)*

Perkara Guru SD Islam Al Azhar 21 Pontianak Berakhir Damai, Kedua Pihak Akhirnya Saling Memaafkan



Kedua pihak akhirnya saling memaafkan dalam pertemuan di kediaman Ayah Azza Abrar Aipda Abdi S pada Rabu, 19 Maret 2025

Pontianak, Dekade – Perkara yang menimpa Guru Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 21 Pontianak Muhammad Saelan akhirnya berakhir damai secara kekeluargaan. Kedua belah pihak akhirnya kini saling memaafkan dalam pertemuan di kediaman Ayah Azza Abrar Aipda Abdi S pada Rabu, 19 Maret 2025.

Dalam pertemuan itu Muhammad Saelan juga didampingi Penasehat Hukum Roliansyah. Muhammad Saelan mengungkapkan permohonan maaf kepada keluarga besar Aipda Abdi S atas kejadian tersebut. Atas perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap anak Aipda Abdi S.

“Saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bapak Aipda Abdi S utamanya kepada Azza Abrar atas kejadian ini,” ungkap Muhammad Saelan.

Penasehat Hukum Muhammad Saelan, Roliansyah menyambut baik penyelesaian kasus yang menimpa kliennya secara damai kekeluargaan. Apalagi momentum tersebut terjadi pada bulan ramadan

yang sangat baik. Sehingga upaya untuk merajut kekeluargaan harus dikedepankan.

“Saya sangat menyambut baik, penyelesaian perkara ini secara damai kekeluargaan, hal ini sangat baik untuk kita secara bersama,” ungkap Roliansyah.

Dirinya menyebut ramadan bukan hanya tentang menjalankan ibadah dan meraih pahala, tetapi juga menguatkan jalinan persaudaraan dan silaturahmi. Termasuk dicerminkan dalam penyelesaian kasus ini yang telah berakhir secara kekeluargaan. Hal ini baginya harus disambut baik oleh kedua belah pihak.

“Kita bersyukur kedua belah pihak telah bersepakat damai, apalagi ini momentum ramadan jadi ini sangat baik,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan nasib malang menimpa Muhammad Saelan, Guru Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 21 Pontianak. Teguran yang diberikannya kepada salah satu siswi kini harus berujung pada status tersangka di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar).

Lantaran orang tua siswi yang merupakan seorang aparat kepolisian tidak terima atas teguran yang diberikan oleh Muhammad Saelan kepada anaknya. Padahal menurut pengakuan Saelan teguran yang dilakukan masih dalam batas wajar untuk mendisiplinkan siswa.

Namun tindakan tersebut yang menghantarkan dirinya kini harus menyanggah status tersangka akibat teguran yang dilakukan kepada siswi. Tak hanya berhenti disitu kejanggalan lainnya muncul pada peristiwa ini.

Jarak waktu kejadian dengan penetapan status tersangka yang cukup panjang pun menjadi pertanyaan publik. Teguran yang dilakukan Muhammad Saelan terhadap siswa ini dilakukan pada November 2023 lalu. Sementara dirinya ditetapkan sebagai tersangka baru pada Februari 2025.

Peristiwa ini pun menyita perhatian publik ramai lantaran teguran yang dilakukan seorang guru disekolah seharusnya diambil sisi positif. Terutama untuk mendisiplinkan siswa bukan malah dilaporkan kepada pihak kepolisian yang berujung penetapan status tersangka kepada seorang guru.

Profesi orang tua siswi pelapor yang merupakan seorang aparat kepolisian juga menjadi sorotan dalam kasus ini. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan apakah kasus ini murni berjalan atau karena paksaan. Karena status profesi orang tua siswi pelapor yang merupakan aparat kepolisian.

Respon Keras PGRI Kalbar

Sementara itu, Pengurus Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia (PP-PGRI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan respon keras atas penetapan status tersangka guru Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 21 Pontianak Muhammad Saelan.

PGRI Kalbar menyayangkan langkah hukum ini, mengingat seorang guru seharusnya tidak bisa dipidana saat menjalankan tugasnya untuk mendisiplinkan siswa.

Hal itu diungkapkan Ketua PGRI Provinsi Kalbar Muhammad Firdaus pada Rabu, 19 Maret 2025. Firdaus mengungkapkan guru tidak bisa dipidana selama menjalankan profesinya dalam rangka pendisiplinan siswa. Hal ini bahkan telah dipertegas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang dipedomani.

“Perlu diketahui, guru tidak dapat dipidana selama menjalankan profesinya dalam rangka mendisiplinkan siswa. Ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,” ujar Ketua PGRI Provinsi Kalbar Muhammad Firdaus.

Ia menilai kasus ini seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui pihak sekolah, apalagi jika tidak ada bukti konkret terkait dugaan tindak kekerasan.

“Kita bisa lihat dari visum dan bukti lainnya. Kalau memang ada kekerasan, itu persoalan lain. Tapi kalau tidak ada bukti yang kuat, mestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” lanjutnya.

Kasus ini sendiri bermula sejak 2023 dan baru pada 2025 ditetapkan status tersangka. PGRI mempertanyakan alasan di balik lamanya proses hukum ini.

“Ini kan proses panjang, dari 2023 sampai sekarang baru ditetapkan tersangka. Ada apa sebenarnya? Kenapa bisa naik dari saksi jadi tersangka?” katanya.

PGRI Kalbar berharap kasus serupa tidak terulang di masa depan. Mereka khawatir, jika kasus seperti ini terus terjadi, para guru akan merasa terancam saat mencoba mendisiplinkan siswa demi membentuk karakter anak bangsa.

“Kalau setiap upaya mendisiplinkan siswa berujung pada ancaman hukum, guru bisa jadi takut. Padahal, hukuman atau disiplin yang diberikan bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan generasi penerus bangsa,” tegasnya. *(Red)*

Kabupaten Sanggau Akan Menerapkan Program Sekolah Lima Hari



Kabupaten Sanggau Akan Menerapkan Program Sekolah Lima Hari

Sanggau, Dekade – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sanggau akan menerapkan program sekolah lima hari untuk jenjang SMP. Kepala Disdikbud Sanggau, Alipius mengatakan, program ini bertujuan mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah serta memberikan waktu istirahat yang cukup bagi siswa.

“Jadi masuk sekolahnya Senin hingga Jumat, sehingga memberikan waktu istirahat lebih panjang bagi siswa. Program ini sebelumnya telah diuji coba pada akhir Februari di beberapa SMP di Kabupaten Sanggau,” ungkap Alipius, Rabu, 19 Maret 2025.

Dari hasil uji coba, diketahui bahwa sekolah memberikan respons sangat positif terhadap penerapan program sekolah lima hari. Berdasarkan survei dari guru dan siswa, mereka merasa nyaman meskipun waktu pulang lebih panjang dibandingkan sebelumnya.

“Sudah kita uji coba di beberapa SMP, seperti SMPN 1 dan beberapa SMP di dalam kota serta kecamatan. Normalnya siswa pulang pukul 12.00 siang, sedangkan dengan program ini, mereka pulang pukul 14.00,” jelasnya.

Alipius menyampaikan, pada tahun ajaran baru, uji coba program sekolah lima hari akan diperluas ke semua kecamatan. Namun, untuk jenjang SD, program ini masih belum diterapkan karena penerapannya dilakukan secara bertahap.

“Kami akan uji coba ke semua kecamatan terutama SMP yang sudah siap, seperti SMPN 1 dan SMPN 2. Ke depannya, kami berharap

program ini bisa diterapkan secara menyeluruh di Kabupaten Sanggau agar pembelajaran lebih efektif,” katanya. (Red)

3 Siswa SMKN 4 Pontianak Berhasil Luncurkan Raket Nusantara



Tiga siswa SMKN 4 Pontianak, Kalimantan Barat, Daris Cahyo Adi, Fathur Rahman, dan Abdul Aziziga, berhasil menorehkan sejarah sebagai pengembang roket amatir pertama di Indonesia

Pontianak, Dekade – Tiga siswa SMKN 4 Pontianak, Kalimantan Barat, Daris Cahyo Adi, Fathur Rahman, dan Abdul Aziziga, berhasil menorehkan sejarah sebagai pengembang roket amatir pertama di Indonesia.

Dibimbing oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dan tergabung dalam Tim Mengangkasa, roket bernama Roket Nusantara ini berhasil melesat hingga ketinggian 903 meter pada peluncuran perdana, dengan target mencapai 1 kilometer.

Uji coba peluncuran roket dilaksanakan pada 16-17 Januari 2025 di Air Weapon Range (AWR), Lumajang, Jawa Timur. Pada fase awal pengujian, ketinggian maksimum yang berhasil dicapai roket hanya sebesar 76 meter.

Meski demikian, tim pantang menyerah dan secara konsisten melakukan optimasi desain hingga akhirnya roket tersebut sukses menembus ketinggian di atas 1 kilometer.

Roket ini dikembangkan menggunakan bahan bakar Ammonium Nitrate Composite Propellant (ANCP) yang ramah lingkungan. Proses pengembangannya memakan waktu 4 bulan, dimulai sejak Oktober 2024.

Tim juga menerapkan strategi baru untuk meminimalkan risiko kegagalan, seperti pemasangan mesin roket setelah badan roket terpasang di rel.

Salah satu siswa dari SMKN 4 Pontianak, Daris Cahyo Adi, menyampaikan bahwa peluncuran ini merupakan kelanjutan dari peluncuran Roket Bridge pertama pada Januari. Tim Mengangkasa melakukan persiapan matang dan pengujian ulang terhadap seluruh komponen roket, mulai dari sistem avionik, propelan, parasut roket, ignitor, hingga perangkat detonator.

Untuk meminimalkan risiko kegagalan, tim menerapkan strategi baru, yaitu memasang mesin roket setelah roket terpasang di rel.

“Hasil peluncuran pada roket kali ini sangat memuaskan karena kami membuktikan bahwa desain kita lumayan stabil dan juga saat diluncurkan pada kesempatan kali ini, roket kita alhamdulillah mencapai target,” ujar Daris Cahyo Adi.

Kolaborasi dengan Tim Bamtara Pans

Catatan sejarah roket amatir pertama di Indonesia buatan pelajar SMK ini merupakan bagian dari program Roket Nusantara Batch 2. Tim ini tiga kali menggelar tiga percobaan peluncuran, yaitu peluncuran ke-3, ke-4, dan ke-5 dari rangkaian sebelumnya.

Pencapaian bersejarah roket amatir pertama karya pelajar SMK di Indonesia ini merupakan bagian dari Program Roket Nusantara Batch 2. Tim melakukan tiga kali percobaan peluncuran tambahan (ke-3, ke-4, dan ke-5) setelah rangkaian uji sebelumnya.

Melalui unggahan resmi PT Pasifik Satelit Nusantara di LinkedIn, Program Batch 2 dirancang untuk mencapai tiga tujuan utama:

Mencapai target ketinggian 900 meter,

Memulihkan badan roket dan muatan (payload) menggunakan parasut,

Menerapkan sistem closed-loop roll control guna menjaga stabilitas arah dan rotasi roket selama penerbangan.

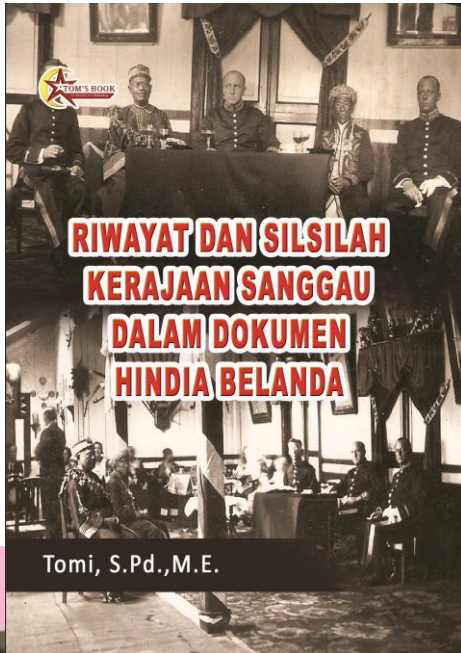
Kolaborasi dengan Tim Bamtara Pans turut memperkuat proyek ini. Mereka menyumbangkan satelit Kensat sebagai muatan roket, menandai integrasi antara teknologi roket dan satelit buatan anak

bangsa. Peluncuran ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan roket sebelumnya yang diluncurkan pada Januari 2024.

Karya ini membuktikan bahwa siswa SMK mampu bersaing di bidang sains dan teknologi dan mendorong inovasi pendidikan vokasi.

Agus Putranto, perwakilan PT PSN, mengapresiasi dedikasi siswa, “Ini langkah awal untuk membuka peluang pengembangan teknologi antariksa di tingkat pendidikan menengah”, ungkap Agus. (Red)





DEKADE

MEDIA EDUKASI EKSKLUSIF

